

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA
TAHUN 2013

Ahmad David Darissalam

e-mail: darissalam1993@gmail.com

Hp: 0856-4858-4889 / 0857-5529-5379

Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (<10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi.

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan, Kinerja Keuangan, Otonomi Daerah, Penerimaan Asli Daerah

Semenjak diputuskannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda), semua wilayah daerah otonom di Indonesia baik itu propinsi maupun kabupaten dan kota menjadi garda depan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, daerah juga diberi hak untuk mengurus masalah rumah tangganya sendiri dan melakukan pembangunan di berbagai sektor di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Susantih dan Saftiana, 2008:2)

Diberitakan dalam harian Kompas tertanggal 15 Desember 2012 bahwa menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Gamawan bahkan mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah 70 persen dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal. Hal ini menunjukkan terjadinya kecenderungan pemekaran wilayah yang diusulkan oleh masyarakat daerah karena alasan budaya, kesukuan, dan aspirasi belaka yang belum diikuti dengan perhitungan biaya yang digunakan untuk pemekaran tersebut. (Kompas Online, 2012)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Dari definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut Halim (2007:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim (2007:128). Untuk mengukur kemampuan keuangan, menggunakan: 1) Rasio Desentralisasi; 2) Rasio Ketergantungan Pendapatan; 3) Rasio Kontribusi BUMD; 4) Rasio Efektifitas PAD; 5) Rasio Belanja Rutin; 6) Rasio Belanja Pembangunan. Kemudian untuk mengukur kinerja keuangan, menggunakan: 1) Rasio Pertumbuhan; 2) Rasio Efektifitas PAD; 3) Indeks Kemampuan Keuangan. Kemudian hasil analisis tersebut kita bandingkan dengan pengukuran IPM dan indikator-indikator yang mengiringi sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, ukuran IPM digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan otonomi suatu daerah yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3). Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka digunakanlah IPM dan beberapa indikator yang mendampingi. IPM disini sendiri menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2012:9) Lokasi penelitian berada di lembaga-lembaga pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dan berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu:

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nganjuk
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang cenderung konstan. Terakhir pada tahun 2013 IPM Kabupaten

Nganjuk menunjukkan angka 72,49, sehingga Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kategori Menengah-Tinggi (60 hingga 80). Sehingga dari sisi skor IPM, Kabupaten Nganjuk termasuk cukup sukses dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemudian melihat dari indikator tingkat pengangguran, dilihat dari perbandingan pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia, dari tahun 2007 hingga 2013, Kabupaten Nganjuk tergolong tinggi di awal kemudian turun drastis pada tahun 2012, bahkan angka persentasenya negative, dan justru di tahun 2013 semakin turun yaitu -19,71%, dan pertumbuhan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu -58,30%. Artinya di Kabupaten Nganjuk ada sekitar 179 lowongan yang tidak terisi atau jumlah lowongan lebih banyak 179 posisi dari pada pencari kerja. Sehingga dari sisi pengentasan pengangguran, Kabupaten Nganjuk termasuk berhasil dalam hal ini.

Selanjutnya dari indikator ketiga yaitu Pendapatan per Kapita, data menunjukkan bahwa selama rentang waktu antara tahun 2007 hingga 2013, terjadi peningkatan yang cenderung konstan, namun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2013 nilai pendapatan per Kapita per bulan Kabupaten Nganjuk adalah Rp 641.550,00 atau dengan kata lain daya beli masyarakat di Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dirasa kurang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Indikator keempat yaitu Jumlah Penduduk Miskin, menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2010-2013, namun tidak begitu signifikan. Kemudian pada tahun 2013, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk sebesar 29,05%. Artinya menurut ukuran *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi*, Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori menengah. Hal ini nampaknya berbanding lurus dengan nilai daya beli masyarakat yang tergolong rendah. Dalam hal ini, pemerintah daerah belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya indikator kelima, yaitu Angka Melek Huruf yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memerangi kebodohan, diketahui bahwa Kabupaten Nganjuk mendapatkan hasil yang cukup bagus. Di tahun 2013, Kabupaten Nganjuk mendapatkan nilai sebesar 91,16, dan tren yang terjadi mulai dari tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami peningkatan meskipun peningkatan di tiap tahunnya tidak sampai melebihi 0,5%, kecuali pada tahun 2011 yang mencapai 0,65%. Dalam penilaian indikator ini, dari besarnya angka melek huruf, pemerintah daerah dinilai sudah cukup berhasil dalam memberantas buta huruf. Sedangkan untuk persentase peningkatan angka melek huruf dari tahun ke tahun, nampaknya pemerintah daerah perlu berusaha lebih keras untuk mencapai angka 95 ke atas untuk memperoleh peringkat bebas buta aksara menurut penilaian *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (2013: 41). Perlu diketahui untuk pengukuran angka melek huruf, penduduk dengan usia dibawah sepuluh tahun tidak dimasukkan dalam penghitungan angka melek huruf.

Selanjutnya indikator terakhir adalah Angka Harapan Hidup, yang menggambarkan tingkat kualitas kesehatan dan keamanan sosial masyarakat melalui rata-rata panjang usia maksimal manusia yang dapat dicapai. Kabupaten Nganjuk sendiri pada tahun 2013 mendapatkan nilai 69,82, mendekati 70. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki panjang usia hampir mencapai 70 tahun atau masuk dalam kategori rata-rata, dan tren yang terjadi dari tahun 2007 terus menunjukkan peningkatan. Akan tetapi angka ini masih dibawah nilai Jawa Timur yaitu 73,54 dan nilai Angka Harapan Hidup Indonesia yaitu sebesar 73,81 di tahun yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun semakin baik, dan dalam hal ini pemerintah daerah dianggap sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang kesehatan, akan tetapi perlu adanya peningkatan sebab posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk masih berada di bawah Jawa Timur dan Indonesia.

Ketika dikonfirmasi tentang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, Gatut Sugiarto, Kepala Bagian Perekonomian Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama ini merupakan bentuk kinerja terbaik sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang sudah mana mestinya.

Pada gambaran kondisi keuangan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 terlihat bahwa terdapat selisih antara Total Penerimaan dan Total Belanja sebesar Rp 72.644.849.985,51, di mana total pendapatan lebih besar daripada total pengeluaran atau dengan kata lain ada sekitar 72,6 Milyar Rupiah yang tidak digunakan. Demikian juga ketika kita melihat tabel 4.9 Rasio Ketergantungan, menunjukkan bahwa porsi Dana Transfer dalam Total Penerimaan Daerah mengalami naik turun. Akan tetapi jika lebih dicermati, sebenarnya jumlah Dana Transfer yang digulirkan antara tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. (Badan Pusat Statistik Nganjuk, 2014: 329)

Pada tahun 2013, porsi Belanja Rutin masih cukup tinggi sekitar 82,02%. Nilai ini sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan tren penurunan dimulai pada tahun 2010 di mana pada tahun inilah rekor porsi Belanja Rutin berada pada posisi 91,84%, yang berlanjut mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2013. Dan porsi yang belanja terbanyak digunakan untuk Belanja Pegawai, sebesar 75,56% dari Total Belanja Rutin atau 60,50% dari Total Belanja Daerah (lihat lampiran penghitungan belanja rutin). Kemudian untuk porsi Belanja Pembangunan hanya 16,10% dari Total Belanja Daerah. Porsi terbanyak digunakan untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu, sebesar 57,35% dari Total Belanja Pembangunan, atau 9,23% dari Total Belanja Daerah (untuk lebih jelasnya lihat lampiran penghitungan belanja pembangunan).

Banyaknya anggaran yang belanja yang terserap ke dalam Belanja Rutin, khususnya Belanja Pegawai, dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk penggajian Pegawai Negeri Sipil. Menurut Dyah Puspita Rini, anggaran untuk menggaji seluruh PNS dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk memang cukup besar. Selain itu, menurutnya belum dilakukannya Renumerasi PNS di jajaran Pemkab Nganjuk turut mempertahankan postur anggaran yang terlalu gemuk tersebut. Selain itu, adanya kecenderungan SKPD untuk memperbanyak kegiatan juga turut membebani anggaran belanja. Pada tahun 2013, Rasio Desentralisasi Pendapatan mengalami kenaikan 8,18%, artinya terjadi peningkatan positif dari tahun sebelumnya. Dan tren yang sedang terjadi adalah pertumbuhan Rasio Desentralisasi juga mengalami tren peningkatan setelah terjadi tren menurun yang berhenti pada tahun 2011. Peningkatan seperti ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah, mengingat bahwa rasio Desentralisasi Pendapatan Kabupaten Nganjuk masih berada pada posisi sangat kurang.

Kemudian pada Rasio Ketergantungan Pendapatan justru terjadi tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, Rasio Ketergantungan Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1,63%, dan pada tahun sebelumnya justru mengalami penurunan 2,39%. Meskipun pada jumlah Dana Transfer yang digelontorkan oleh pemerintah pusat semakin bertambah, tapi tidak terjadi pada rasio pertumbuhannya. Pada tahun 2008 hingga 2011, terjadi tren menurun seperti yang dialami oleh Rasio Desentralisasi Pendapatan. Seharusnya, apabila pertumbuhan Rasio Desentralisasi Pendapatan menurun, pertumbuhan Rasio Ketergantungan Pendapatan akan naik. Hal seperti ini bisa saja terjadi dikarenakan pos Peenerimaan Daerah yang ketiga yaitu, Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami peningkatan secara besar, sehingga ikut menekan pertumbuhan Rasio Ketergantungan Pendapatan.

Selanjutnya untuk pertumbuhan Rasio Kontribusi BUMD pada tahun 2013 justru menunjukkan tren yang negative. Terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 36,11% dari tahun sebelumnya. Dan tren penurunan pertumbuhan Rasio Kontribusi BUMD ini juga terjadi pada tahun 2012. Padahal pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kontribusi BUMD belum signifikan dalam menyokong PAD.

Untuk pertumbuhan Rasio Belanja Rutin, pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 4,85%. Sebelumnya tren penurunan sudah terjadi sejak tahun 2011. Demikian juga untuk Rasio Belanja Pembangunan mulai peningkatan yang cukup besar yaitu, sebesar 16,06% dari tahun sebelumnya, dan tren peningkatan ini terjadi sejak tahun 2011 juga. Artinya, Pemerintah Daerah mulai melakukan pengalihan anggaran dari belanja rutin ke belanja pembangunan, meskipun secara perlahan. Akan tetapi

peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 mengalami penurunan setengah dari tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya Belanja Tak Terduga yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

Untuk indikator IKK, Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2013 berada pada posisi 27,73 atau kemampuan keuangan Kabupaten Nganjuk masih berada pada posisi rendah. Hal ini berbanding lurus dengan Rasio Desentralisasi Pendapatan, dimana juga menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal yang sangat kurang. Demikian juga dengan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang instruksif, artinya seluruh program pemerintah daerah masih disetir oleh pusat dan propinsi.

Pada tahun 2013, nilai Rasio Efektifitas PAD yang dicapai Kabupaten Nganjuk adalah 102,40%, atau penerimaan dari PAD 2,40% lebih banyak dari yang dianggarkan. Tren yang terjadi sejak tahun 2007 adalah realisasi PAD selalu tidak mencapai target hingga tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2013, PAD yang terealisasi selalu melebihi dari target. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai menunjukkan kinerja yang efektif dalam pencapaian PAD, meskipun secara porsi, nilai PAD masih terlalu kecil dibandingkan Dana transfer. Menurut Dyah Puspita Rini, ketika ditanya mengenai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyerapan PAD, apa yang dilakukan Pemerintah Daerah selama ini, hanya merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan.

Penilaian prestasi keberhasilan otonomi daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 bisa dikatakan sukses. Namun, apabila diperinci dengan indikator-indikator yang mengiringi IPM, ada dua indikator yang menunjukkan pencapaian belum berhasil yaitu, dalam bidang Pendapatan per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin. Atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesejahteraan masyarakat masih belum bagus. Hal ini berbeda dengan indikator -indikator lain yang menunjukkan adanya pencapaian yang berhasil.

Kemudian ketika kita melihat dari segi pencapaian prestasi Kemampuan dan Kinerja Keuangan masih rendah. Kita bisa melihat bahwa pada tahun 2013, Kabupaten Nganjuk dari sisi Rasio Desentralisasi Pendapatan masih sangat rendah, sehingga menghasilkan Derajat Desentralisasi Fiskal yang rendah, sehingga untuk menutupi pengeluaran belanja, Pemerintah Daerah menggantungkan pada Dana Transfer dari Pusat dan Propinsi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan nilai Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah. Demikian pula dilihat dari perbandingan porsi Belanja Daerah, anggaran pengeluaran memang masih banyak terserap untuk Belanja Rutin masih tinggi, meskipun tren yang terjadi adalah menurun, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari penjelasan – penjelasan di atas, Nampak tidak adanya hubungan antara prestasi kemampuan dan kinerja keuangan dengan keberhasilan otonomi daerah, dimana prestasi keberhasilan otonomi daerah rata-rata menunjukkan hasil yang positif, sedangkan prestasi kemampuan dan kinerja keuangan tidak demikian. Justru hal tersebut Nampak berbanding terbalik. Akan tetapi jika kita mencermatinya dari porsi anggaran belanja per bidang sektor, maka hasilnya akan berbeda. Anggaran Belanja Daerah banyak dihabiskan untuk sektor pendidikan sebesar 48,28%, hampir setengah dari Belanja Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengentaskan kebodohan tidaklah main-main. Hal ini dibuktikan dengan nilai IPM yang cukup tinggi yaitu 72,49 , dan juga Angka Melek Huruf sebesar 91,16. Meskipun demikian, jika pertumbuhan Angka Melek Huruf hanya 0,05% dari tahun sebelumnya, nampaknya angka belanja pendidikan terlalu besar dan mahal untuk digulirkan. Hal ini seolah-olah terjadi pemborosan anggaran, jika dilihat dari pencapaian pertumbuhan Angka Melek Huruf. Akan tetapi setelah diperiksa kembali, peningkatan yang lambat dalam Angka Melek Huruf disebabkan oleh dua hal, yaitu Angka Melek Huruf yang memang sudah tinggi sehingga tidak mampu lagi untuk naik (tinggi = >90), dan proses peningkatan Angka Melek Huruf yang cukup lama.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah mempunyai andil dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten

Nganjuk pada tahun 2013 dari segi otonomi keuangan. Kecilnya nilai Rasio Desentralisasi Pendapatan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dengan nilai 9,82% (sangat kurang). Dalam hal ini akhirnya Pemerintah Daerah mendapatkan predikat Instruktif dalam Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah, sehingga kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah Daerah banyak dipengaruhi oleh Pusat dan Propinsi. Hal yang senada juga ditunjukkan dengan nilai Rasio Ketergantungan Pendapatan yang sangat tinggi sebesar 90,15% dan juga nilai Rasio Kontribusi BUMD yang sangat kecil sebesar 2,25% dari porsi PAD atau 0,22% dari total penerimaan daerah. Selain itu besarnya Rasio Belanja Rutin dalam anggaran belanja daerah sebesar 82,02% dan Rasio Belanja Pembangunan sebesar 16,10% bias berakibat banyaknya program pembangunan yang tidak mampu untuk dilaksanakan karena tidak dibiayai. Dengan kata lain, kebebasan Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya sendiri masih dibatasi. Akan tetapi, untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, justru banyak dipengaruhi oleh proporsi anggaran belanja daerah berdasarkan bidang. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Nganjuk memberikan porsi yang cukup besar, masing-masing 48,28% dan 13,80%. Hal tersebut berimbas pada tingginya nilai IPM sebesar 72,49, Angka Melek Huruf sebesar 91,16, dan Angka Harapan Hidup sebesar 69,82. Namun hal tersebut tidak terjadi pada bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat mendapat porsi yang sedikit, diantaranya bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perumahan, Ketransmigrasian, Ketahanan Pangan, dan Sosial, jika dijumlah hanya mendapatkan porsi sebesar 2,39%. Hal ini berakibat pada nilai yang didapatkan Kabupaten Nganjuk untuk Pendapatan per kapita masih rendah, sekitar Rp 641.550,00 per bulan dan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 29,05% dari total jumlah penduduk.

Kemudian kinerja keuangan daerah juga mempunyai andil dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013. Nilai pencapaian IKK sebesar 27,73 (rendah) berbanding lurus dengan Rasio Desentralisasi Pendapatan, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan sama. Demikian juga Rasio Pertumbuhan dari masing-masing indikator keuangan menunjukkan gambaran kinerja yang menurun kecuali Desentralisasi Pendapatan yang menunjukkan gambaran yang positif yaitu naik sebesar 8,89%. Peningkatan kinerja dalam peningkatan PAD juga diperlihatkan oleh nilai Efektifitas PAD yang bagus sebesar 102,40% atau melebihi target. Sehingga untuk kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk rata-rata masih rendah kecuali kinerja dalam peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi, (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi. (2012). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk¹. (2009). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2009*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- (2010). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2010*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- (2011). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2011*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- (2012). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2012*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- (2013). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- (2014). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2014*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- Dariwardani, Ni Made Inna dan Amani, Siti Noor. (2010). Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. *Jurnal Adminitrasi Negara STIA LAN* Vol. 1 (1)
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Huda, Nurul dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Kompas Online. (2012). *Mendagri: 70 persen Pemekaran Daerah Gagal*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/06072741/Mendagri.70.Persen.Pemekaran.Daerah.Gagal> (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)
- Kuncoro, Haryo. (2007), *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi X
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan. (tanpa tahun). Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan (Diperoleh pada tanggal 9 Desember 2014)
- Pemerintah Republik Indonesia¹. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)

- ². (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Jakarta. <http://prokum.esdm.go.id/uu/2004/UU-32-2004.PDF> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)
- ³. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf (Diperoleh pada tanggal 10 Nopember 2014)
- ⁴. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. <http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/3067/pp-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah.pdf> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)
- ⁵. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2008.pdf
- PortalKBR. (2013). *Mendagri : Tiga Perempat Otonomi Baru Gagal*. http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3074237_4202.html (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)
- Rasjid, H. Sulaiman. (1992). *Fiqh Islam* Cet. kedua puluh lima. Bandung: Sinar Baru
- Rista, Alma. (2013). *Manajemen Keuangan Negara Islam*. <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/05/keuangan-negara-dalam-islam.html> (Diperoleh pada 10 Nopember 2014)
- Sakti, Adhidian Fajar. (2007). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi (Tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Savitry, Ermitha. (2013). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, Havid. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi* Vol. 1 (2)
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Jurnal Pascasarjana Universitas Sriwijaya* Vol. 2 (3)
- The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi. (2013). *Sosialisasi Parameter Evaluasi & Monitoring Otonomi Daerah Melalui Kompetisi Kemajuan dan Pemingkatan Otonomi Award Kabupaten / Kota*

di *Provinsi* *Jawa* *Timur.*
<http://pustaka.jpip.or.id/images/pustaka/Sosialisasi%20OA%202013-JPIP%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf> (Diperoleh pada 1 Desember 2014)

Tribun Batam. (2014). *57 Daerah Otonomi yang Melakukan Pemekaran Gagal Berkembang*. <http://batam.tribunnews.com/2014/05/03/57-daerah-otonomi-yang-melakukan-pemekaran-gagal-berkembang> (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)

Wulandari, Anita. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 November*. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011>) Diperoleh tanggal 26 November 2014).

Yuliati. (2001). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.